BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Adanya globalisasi teknologi informasi mengubah derasnya arus informasi melalui internet dalam masyarakat seakan-akan datang tanpa bisa dibendung, dan sekarang ini sudah menjadi gaya hidup (*life style*) dimana-mana.¹ Hal ini ditunjang dengan semakin mudahnya akses berselancar di dunia maya dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan oleh produsen ponsel serta operator telepon untuk semua orang tanpa batasan usia. Fenomena yang luar biasa ini berbanding lurus dengan luasnya ruang kebebasan berekspresi di dunia maya bagi masyarakat. Seseorang dengan mudah menuangkan apa yang terlintas dibenaknya dengan menggunakan piranti media sosial melalui perangkat *mobile* yang dilengkapi fasilitas internet didalamnya dengan tidak boleh menyerang atau merendahkan harkat martabat dan kehormatan orang lain. Intensitas kicauan di *twitter*, update status di *facebook* kian tinggi dan makin sering menjadi fenomena yang lazim terjadi. Kemudahan dan banyaknya fasilitas inilah yang menjadi banyak orang menggunakannya dikarenakan cepat, tepat, efisien dan efektif melalui fasilitas *email*, *faximale*, *chating*, komunikasi via net dan lainnya.

Teknologi informasi telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi telah pula menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum yang secara signifikan berlangsung demikian pesat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. sarana yang dapat digunakan mulai dari *radio*, *televisi*, *telepon*, *telepon genggam*, *telegram*, *faximile*, dan yang terakhir internet melalui jaringan komputer. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain

¹ Fahrulrozi, *Penerapan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Bama Baik*, Universitas Bhayangkara, 2018, Skripsi, http://repository.ubharajaya.ac.id/1238/2/201410115081_Fahrulrozi%20Wirahadikusuma_h_BAB%20I.pdf, diakses 17 Noveber 2022 Pukul 11.00 WIB

memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif dalam melakukan perbuatan melawan hukum.²

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “menghina”, yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Yang diserang biasanya merasa “malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan “kehormatan” dalam lapangan seksuil. Seperti hal yang terjadi dalam putusan No.740/Pid.sus/2018/PN SMN yang dimana pelapor (AL) merasa nama baiknya diserang dan dipermalukan oleh terlapor (VP).³

Untuk melindungi para pemanfaatan Teknologi Informasi maka pada Tanggal 21 April 2008 telah diundangkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disingkat UU ITE). Undang-undang ITE bukanlah undang-undang Tindak Pidana Khusus, berhubung UndangUndang ini tidak semata-mata memuat hukum Pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat, yang menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang secara langsung memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.⁴

Mengenai penghinaan KUHP merumuskan tindak pidana pencemaran nama baik dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) dan Ayat (2) sebagai berikut:

“barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan tertentu, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum, dihukum karena salahnya menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis,

² Meganuary Herjayani Putri, 2014 , ”*Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Internet*”, Skripsi

³ R. Soesilo,1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeria, Bogor, hlm. 226.

⁴ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creativ, Malang, hlm.1-2.

diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Sedangkan UU ITE pun mengatur pula mengenai pencemaran nama baik yang dirumuskan dalam ketentuan Pasal 27 ayat (3) yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya data Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Bagi masyarakat Indonesia “kehormatan dan nama baik” telah tercakup pada Pancasila, baik pada Ketuhanan Yang Maha Esa maupun pada Kemanusiaan Yang Adil dan beradab serta dicantumkan dalam beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dampak atau Implikasi dari pencemaran nama baik apa yang penulis teliti dalam penelitiannya Sebagai makhluk sosial manusia tidak akan pernah terlepas dari pergaulan antar sesama. Mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Dibantu dengan berkembangnya Teknologi yang pesat saat ini menjadikan penerimaan Informasi dan pengiriman data dapat diterima dengan cepat dan mudah yang membuat seakan-akan Dunia menjadi tanpa batas. Sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Internet adalah produk dari perkembangan Teknologi yang pesat yang menyediakan berbagai aplikasi yang memudahkan manusia dalam mengakses Informasi. Akses Internet tersebut saat ini dapat dinikmati dengan berbagai cara, seperti berlangganan koneksi Internet di rumah, mengakses dari area-area hotspot, handphone yang dapat dijadikan modem dan lain sebagainya. Perkembangan Teknologi yang sangat cepat dalam kehidupan manusia bagaikan dua sisi mata uang yang memberikan dampak positif sekaligus dampak negatif. Dampak positif dari perkembangan teknologi saat ini adalah memudahkan kita mendapatkan Informasi dari Internet. Selain itu masyarakat menjadi mudah berinteraksi satu sama lain menggunakan berbagai macam sosial media yang tersedia di internet. Selain memberikan dampak positif, teknologi juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat diantaranya yaitu semakin banyaknya kasus penipuan melalui Internet.

Namun demikian tindakan pencemaran nama baik masih banyak ditemui dalam kehidupan ini. Meski peraturan perundang-undangan secara jelas mengaturnya. Hal tersebut dikarenakan akibat adanya kemajuan Teknologi yang berkembang pesat

memungkinkan munculnya jenis kejahatan baru yang dapat dilakukan melalui internet. Pencemaran nama baik melalui Internet meskipun bersifat virtual, dapat dinyatakan sebagai perbuatan atau tindakan hukum yang nyata. Dengan demikian subjek pelaku pencemaran nama baik melalui Internet dikualifikasikan sebagai orang yang telah melakukan tindakan hukum nyata sehingga penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum, untuk itu penulis mengangkat judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus Putusan 40/Pid.Sus/2018/PN SMN)**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan delik pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana?
2. Apakah penerapan hukum pidana dalam putusan No.40/Pid.Sus/2018/PN SMN sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah berdasarkan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informas dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam penelitian ini akan membahas tentang delik mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan hukum pidana serta, penegakan hukum pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri No.40/Pid.Sus/2018/PN SMN

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan bagi penulis agar mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sedangkan berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan tersebut diatas.
2. tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana.
- b. Untuk menganalisis apakah penerapan hukum pidana dalam putusan No.40/Pid.Sus/2018/PN SMN sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan sebuah konsep berupa abstraksi dengan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang tujuan dasarnya untuk untuk membuat atau mengadakan identifikasi sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis yang mana dalam hal ini adalah karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi.⁵ Dalam penelitian ini penulis akan memilih untuk menggunakan :

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁶

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau

⁵ L. Moleong, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 34-35

⁶ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

⁷ Moeljatno, 1993, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, hlm. 23.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termasuk atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum itu adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena memerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁸ Teori kepastian hukum cirinya adalah tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Kepastian adalah mengenai keadaan yang pasti. Hukum secara hakikat harus pasti dan adil.

Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak

⁸ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 23.

menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan karena hukum bertugas menciptakan kepastian hukum dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa untuk mencapai ketertiban diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia di masyarakat, karena tidak mungkin manusia dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum dan ketertiban. Untuk dapatnya seorang pelaku tindak pidana dapat dipidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya adalah tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan.⁹Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang.

2. Kerangka Konsep

- a. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁰
- b. Pencemaran Nama Baik (*defamation*) Adalah tindakan mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyatakan sesuatu baik melalui lisan ataupun lisan.¹¹ Pencemaran terbagi kedalam beberapa bagian yaitu :
 - 1) Secara lisan, yaitu pencemaran nama baik yang di ucapkan.
 - 2) Secara tertulis , yaitu pencemaran yang di lakukan melalui tulisan.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, 2010, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18-19.

¹¹ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 47

- c. Media Elektronik adalah informasi atau data yang dibuat, disebarkan, dan diakses dengan menggunakan suatu bentuk elektronik, energi elektromekanikal, atau alat lain yang digunakan dalam komunikasi elektronik. Yang termasuk ke dalam media elektronik antara lain : televisi, radio, komputer, handphone, dan alat lain yang mengirim dan menerima informasi dengan menggunakan elektronik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), media elektronik adalah sarana media massa yang menggunakan alat-alat elektronik modern, seperti radio, televisi, komputer, handphone, dll.¹²
- d. Informasi dan Transaksi Elektronik terbagi menjadi dua penjelasan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Informasi Elektronik adalah adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. .13

F. Metode Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹⁴. Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis pergunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) <https://www.kbbi.web.id/elektronik> di akses tgl 21 Desember 2022

¹³ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm 35.

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut akan didapatkan dari berbagai aspek mengenai isu yang dicari jawabnya. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Pertama, yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti.¹⁵

Kedua, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁶

3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan ini, sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷

Beberapa peraturan perundang – undangan diantaranya :

- a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum utama seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, karya hukum,

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Bandung hlm. 133

¹⁶ *Ibid.* hlm. 134

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

buku, terbitan berkala, teori hukum, pendapat ahli, dan situs internet yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, dan artikel-artikel yang akan membantu menambahkan informasi untuk memperjelas jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian penulis dalam mengembangkan teknik pengumpulan data berkaitan erat dengan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara melalui studi keputusan. Studi keputusan sendiri adalah analisis data-data dalam hal ini penelitian penulisan hukum ini dilakukan pengumpulan data melalui studi keputusan yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, hasil penelitian, tesis dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi keputusan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Analisis deskriptif sendiri tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data-data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Selanjutnya sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari data-data yang dikumpulkan dipergunakan metode analisis kualitatif, yang dilakukan dengan menginterpretasikan, menguraikan, menjabarkan dan menyusun secara sistematis logis sesuai dengan penelitian. Seluruh dikumpulkan, kemudian dianalisa secara kualitatif dan kemudian diuraikan secara deskriptif.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan ini dibagi menjadi beberapa bab, seperti berikut ini :

BAB I. Pendahuluan.

Bab ini menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian, Sistematika Skripsi.

BAB II. Tinjauan Pustaka.

Dalam bab ini diuraikan mengenai kajian pustaka yang berkenaan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landaan/kerangka teori serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

BAB III. Pembahasan Rumusan Masalah Pertama.

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang kedua yaitu Bagaimana bentuk peraturan hukum mengenai pencemaran nama baik melalui media elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana?

BAB IV. Pembahasan Rumusan Masalah Kedua.

Dalam bab ini berisikan hasil penelitian dan pembahasan pokok permasalahan yang pertama yaitu akah penegakan hukum pidana dan penerapan hukum dalam putusan No.764/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL sudah sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Pidana?

BAB V. Penutup.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan berisi saran dari penulis.